



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 25/INSTR/2022

TENTANG

PERCEPATAN PENYAMPAIAN DATA SEKTORAL DAN GEOSPASIAL KEPADA WALIDATA PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

Untuk percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan mendukung implementasi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagai Walidata Pemerintah Aceh;
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai Walidata Pendukung;
3. Produsen Data di masing-masing SKPA
- Untuk KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung percepatan penyelenggaraan satu data Pemerintah Aceh.
- KEDUA : Ruang lingkup Instruksi Gubernur ini meliputi :
1. Tugas Walidata Pemerintah Aceh;
2. Tugas Walidata Pendukung Pemerintah Aceh;
3. Tugas Produsen Data Pemerintah Aceh;
4. Optimalisasi Layanan Portal Open Data dan Geoportal Pemerintah Aceh; dan
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- KETIGA : Walidata Pemerintah Aceh mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Open Data dan Geoportal Pemerintah Aceh; dan
3. Membantu Pembina Data dalam membina Walidata Pendukung dan Produsen Data.
- KEEMPAT : Walidata Pendukung mempunyai tugas :
1. Memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
3. Membantu Walidata dalam membina Produsen Data.


KELIMA :.../2



- KELIMA** : Produsen Data mempunyai tugas :
1. Memberikan masukan kepada Pembina Data dan Walidata Pemerintah Aceh mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas data;
 2. Menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. Menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata Pendukung.
- KEENAM** : Produsen Data wajib menyampaikan data sektoral pada layanan Portal Open Data dan Data Geospasial pada layanan Geoportal Aceh secara berkala (harian, mingguan, bulanan, tahunan) sesuai dengan ketersediaan data pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh. Produsen data juga wajib menyampaikan laporan kepada Walidata sebagai bahan monitoring dan evaluasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh.
- KETUJUH** : Walidata Pemerintah Aceh sebagai pengumpul data sektoral dan geospasial membuat Bank Data Pemerintah Aceh yang merupakan kumpulan data statistik sektoral dan geospasial lintas instansi yang menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dan informasi geospasial (terlampir).
- KEDELAPAN** : Agar instruksi ini dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 November 2022
29 Rabiul Akhir 1444


GUBERNUR ACEH, *[Signature]*
ACHMAD MARZUKI

LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR : 25/INSTR/2022

NO	DATA STATISTIK SEKTORAL	SKPA
1	2	3
1	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan UEP (Usah Ekonomi Produktiff) di Kabupaten / Kota	Dinas Sosial Aceh
2	Jumlah Panti Asuhan yang mendapatkan bantuan subsidi permakanaan di Kabupaten/Kota	
3	Jumlah Panti Disabilitas yang mendapatkan bantuan subsidi permakanaan di Kabupaten/Kota	
4	Jumlah Panti Lansia yang mendapatkan bantuan subsidi permakanaan di Kabupaten/Kota	
5	Jumlah alat bantu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sudah tersalurkan	
6	Jumlah Klien di UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (Anak Terlantar) Dinas Sosial Aceh	
7	Jumlah Klien di UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang (Lansia) Dinas Sosial Aceh	
8	Jumlah Klien di UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh	
9	Jumlah Klien di UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya Dinas Sosial Aceh	
10	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan masa panik	
11	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan	
12	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang mendapat jaminan sosial	
13	WKSBM Yang Mendapatkan bantuan	
14	Jumlah pekerja migran, nelayan terdampar, orang terlantar, pemulangan jenazah yang mendapatkan bantuan biaya pemulangan	
15	Jumlah PSKS (Potensi Sumber Kesejahtraan Sosial) di provinsi Aceh	
16	Data Jumlah LPM Aktif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh
17	Data Jumlah PKK Aktif	
18	Data Jumlah Posyandu Terintegrasi	
19	Data Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	
20	Data Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa	
21	Data Jumlah Desa yang melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga	
22	Data Status Evaluasi Perkembangan Desa	
23	Data Jumlah Desa Yang Sudah Menginventarisir Aset melalui Aplikasi Sipades	

24	Data Katagori Posyantek	Dinas Kesehatan Aceh
25	Data Jumlah Kawasan Perdesaan	
26	Data Jumlah Lembaga Adat	
27	Data Peningkatan Kapasitas yang dilakukan DPMG Aceh	
28	Angka Kematian Bayi (AKB)	
29	Angka Kematian Balita	
30	Angka Kematian Neonatal	
31	Angka Kematian Ibu	
32	Pravelensi Gizi buruk dan Gizi Kurang	
33	Balita gizi buruk	
34	Balita gizi kurang	
35	Balita stunting	
36	Rasio posyandu per satuan balita	
37	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	
38	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	
39	Rasio dokter per satuan penduduk	
40	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	
41	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	
42	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	
43	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	
44	Non Polio AFP rate	
45	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	
46	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	
47	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	
48	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	
49	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	
50	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	
51	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	
52	Penderita diare yang ditangani	
53	Angka kejadian Malaria	
54	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	
55	Cakupan kunjungan bayi	
56	Cakupan puskesmas	
57	Cakupan puskesmas pembantu	
58	Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	
59	Cakupan pelayanan nifas	
60	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	
61	Cakupan pelayanan anak balita	
62	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat SMP	

63	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
64	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
65	Jumlah Puskesmas yang ada
66	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
67	Persentase Puskesmas Terakreditasi
68	Persentase balita gizi buruk
69	Prevalensi balita gizi kurang
70	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
71	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
72	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
73	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
74	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
75	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
76	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
77	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000
78	Tingkat kematian akibat malaria
79	Cakupan pembantu puskesmas
80	Jumlah Sarana Kesehatan RS, Puskesmas Keliling, Pustu, Puskesmas rawat inap, apotek, klinik pratama dan klinik utama
81	Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat Level I
82	Rawat Inap dan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RITL dan RJTL)
83	Jumlah orang dengan Gangguan Jiwa berat di Sarana Pelayanan Kesehatan
84	Cakupan Posyandu Menurut Strata
85	Rasio Posyandu per 100 Balita
86	Posbindu PTM (Penyakit Tidak menular)
87	Jumlah dan Rasio Tenaga Medis (dokter umum, spesialis, dokter gigi) di Sarana Kesehatan
88	Jumlah dan Rasio Tenaga Keperawatan (Bidan, perawat) di Sarana Kesehatan
89	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, dan Gizi di Sarana Kesehatan
90	Jumlah dan Rasio Tenaga Keterampilan Fisik dan Keteknisian Medik di Sarana Kesehatan
91	Jumlah dan Rasio Tenaga Kefarmasian (teknik kefarmasian dan apoteker di Sarana Kesehatan
92	Jumlah dan Angka Kematian Ibu (AKI) di laporkan

93	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
94	Persentase Ibu Nifas Mendapat Vitamin A
95	Persentase Cakupan Imunisasi Td Ibu Hamil dan Wanita Usia Subur
96	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Tablet Tambah Darah
97	Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan
98	Persentase Peserta KB Aktif
99	Persentase Peserta KB Pasca Persalinan
100	Penanganan Komplikasi Neonatal
101	Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)
102	Cakupan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) dan KN Lengkap
103	Cakupan Bayi diberi ASI Eksklusif
104	Pelayanan Kesehatan Bayi
105	Desa/Kelurahan UCI
106	Imunisasi Campak / MR Pada Bayi
107	Pemberian Vitamin A pada Bayi dan Anak Balita
108	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
109	Balita ditimbang
110	Balita Gizi Kurang (BB/Umur), Pendek (TB/Umur) dan Kurus (BB/TB)
111	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
112	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (60+ tahun)
113	Penyakit Menular Langsung
114	Tuberkulosis
115	Penemuan Penderita Pneumonia pada Balita
116	Jumlah kasus HIV
117	Jumlah Penderita Diare dilayani
118	Jumlah kasus baru Kusta
119	Acute Flaccid Paralysis (AFP) non Polio per 100.000 Penduduk < 15 tahun
120	Jumlah kasus Difteri
121	Jumlah kasus suspek Campak
122	Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD)
123	Jumlah kasus positif Malaria
124	Jumlah penderita kronis Filariasis
125	Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan
126	Penderita DM Mendapat Pelayanan Kesehatan
127	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
128	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minum sesuai standar (aman)
129	Desa/kelurahan lima pilar STBM

130	Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
131	Tempat Pengelolaan pangan (TPP) jasa boga yang memenuhi syarat Kesehatan	
132	Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	
133	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	
134	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	
135	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	
136	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	
137	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	
138	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	
139	Dayah Dengan Program Tahfiz Alqur'an	Dinas Pendidikan Dayah Aceh
140	Dayah yang berstandarisasi	
141	Jumlah Dayah Berdasarkan Tipe Menurut Kabupaten/Kota	
142	Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru	
143	Ekspor Bersih Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
144	Defisit perdagangan antar daerah	
145	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	
146	Jumlah kawasan dan sentral industri	
147	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	
148	Pertumbuhan Industri	
149	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	
150	Rasio Ekspor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	
151	Rasio Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	
152	Cakupan bina kelompok pedagang informal	
153	Cakupan bina kelompok usaha informal	
154	Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga konstan	
155	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga konstan	
156	Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga berlaku	
157	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga berlaku	
158	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)	
159	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga konstan (HK)	
160	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)	

161	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
162	Kawasan industri
163	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
164	Nilai Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga konstan
165	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga konstan
166	Nilai Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga berlaku
167	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga berlaku
168	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
169	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga konstan (HK)
170	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
171	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
172	Cakupan bina kelompok pengrajin
173	Jumlah Penerbitan TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
174	Neraca Perdagangan Provinsi Aceh
175	Perkembangan Jumlah dan Nilai IKM Aceh
176	Luas Lahan Garam Provinsi Aceh
177	Jumlah penggunaan Bahan baku sektor industri
178	Jumlah penggunaan Energi Sektor industri
179	Jumlah produksi sektor industri
180	Perkembangan Infrastruktur Kawasan Industri
181	Utilisasi Industri Pengolahan Non migas
182	Utilisasi Kawasan Industri
183	Identitas Peralatan Bergerak Internasional(International Mobile Equipment Identity
184	IKM alas kaki yang mendapatkan bimbingan teknis
185	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitasi Esmart IKM yang memanfaatkan penjualan online
186	IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan
187	IKM yang memanfaatkan penjualan online
188	IKM yang memanfaatkan perbaikan kemasan dan perlindungan merk
189	IKM yang merestrukturisasi Mesin/Peralatan
190	Jumlah IKM Start-Up Berbasis Teknologi (Indonesia Food Innovation)

191	Jumlah IKM Start-Up Berbasis Teknologi melalui Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI)
192	Jumlah IKM Start-Up Berbasis Teknologi melalui Bali Creative Industry Center
193	Jumlah IKM yang memperoleh membership ecommerce ekspor (verified) membership ecommerce ekspor (verified)
194	Jumlah IKM yang memperoleh membership ecommerce ekspor (verified) sektor Industri Aneka
195	Jumlah Tenant Inkubator Bisnis
196	Pendaftaran NIB oleh kelompok usaha / unit bisnis di Pondok Pesantren
197	Peningkatan daya saing Sentra IKM dan UPT Kimia, Sandang, Kerajinan dan Industri Aneka Yang Mendapat Fasilitas
198	Peningkatan daya saing Sentra IKM dan UPT Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Fasilitas
199	Peningkatan daya saing Sentra IKM dan UPT Pangan, Barang Dari Kayu dan Furnitur Yang Mendapat Fasilitas
200	Promosi dan Pameran dimanfaatkan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Fasilitas Promosi dan Pameran
201	Sertifikat Produk IKM
202	Sertifikat Produk IKM Kimia, Sandang, Kerajinan, dan Industri Aneka yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan, Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan
203	Sertifikat Produk IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Produk dan Penguatan Mesin/Peralatan
204	Sertifikat Bagi IKM
205	Big Data Industri
206	Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) - Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
207	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan
208	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa
209	Jumlah Perusahaan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar
210	Perubahan Modal Tetap Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar
211	Total Nilai Output Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar

212	Total Biaya Input Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
213	Nilai Tambah (Harga Pasar) Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
214	Pajak Tidak Langsung Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
215	Nilai Tambah (Biaya Faktor Produksi) Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
216	Rincian Nilai Output Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
217	Rincian Biaya Input Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
218	Indeks Produksi Bulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
219	Indeks Produksi Triwulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
220	Pertumbuhan Produksi Bulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
221	Pertumbuhan Produksi Triwulanan Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
222	Jumlah tenaga kerja industri pengolahan	
223	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	
224	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
225	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	
226	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	
227	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	
228	Kunjungan wisata	
229	Jumlah grup kesenian	
230	Kawasan pariwisata	
231	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	
232	PAD sektor pariwisata	
233	Jumlah Tamu Mancanegara yang Datang ke Provinsi Aceh (Orang)	
234	Jumlah Tamu Nusantara yang Datang ke Provinsi Aceh	
235	Jumlah Situs/Cagar Budaya Di Aceh	
236	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	
237	Jumlah wisatawan mancanegara	
238	Jumlah Wisatawan Nasional	
239	Jasa Pariwisata (Perhotelan, Restoran, dll)	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
240	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	
241	Jumlah Kejadian Bencana	
242	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	

243	Indeks risiko bencana	
244	Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana	
245	Jumlah fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana	
246	Jumlah fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana	
247	Jumlah penduduk yang meninggal dunia dan hilang akibat bencana, per seratus ribu penduduk	
248	Jumlah penduduk yang luka / sakit akibat bencana, per seratus ribu penduduk	
249	Jumlah penduduk yang rumahnya rusak akibat bencana, per seratus ribu penduduk	
250	Persentase pemerintah daerah yang memiliki strategi pnananggulangan bencana yang selaras dengan rencana / strategi nasional penanggulangan bencana	
251	Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh
252	Jumlah LSM	
253	Pembinaan politik daerah	
254	Angka kriminalitas	
255	Angka kriminalitas	
256	Aspek Indeks Demokrasi Indonesia	
257	Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi Pemerintah Aceh	Badan Kepegawaian Aceh
258	Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah Aceh	
259	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada instansi Pemerintah Aceh	
260	Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)	
261	Jumlah Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang wewenang penetapannya berada pada Presiden	
262	Jumlah Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh yang wewenang penetapannya berada pada Presiden	
263	Jumlah penerima Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
264	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Aceh
265	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsinya	
266	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran	
267	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh	
268	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Menurut Daerah Pemilihan (Dapil) dan Jenis Kelamin di Aceh	

269	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Dinas Perhubungan Aceh
270	Jumlah arus penumpang Angkutan Darat	
271	Jumlah arus penumpang Angkutan Laut	
272	Jumlah arus penumpang Angkutan Udara	
273	Rasio ijin trayek	
274	Jumlah uji kir angkutan umum	
275	Jumlah Pelabuhan Laut	
276	Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	
277	Jumlah Bandar Udara	
278	Jumlah Terminal Tipe A	
279	Jumlah Terminal Tipe B	
280	Jumlah Terminal Tipe C	
281	Persentase layanan angkutan darat	
282	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	
283	Pemasangan Rambu-rambu	
284	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	
285	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	
286	Jumlah orang/barang melalui Terminal per tahun	
287	Jumlah orang/barang melalui Bandara per tahun	
288	Jumlah orang/barang melalui Dermaga per tahun	
289	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	
290	Kapasitas Angkut dan Jumlah yang Diangkut Melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda	
291	Arus Lalu Lintas dan Angkutan Penyeberangan yang Dicatat pada Pelabuhan Balohan-Ulee Lheue	
292	Jumlah Pesawat dan Penumpang yang Datang dan Berangkat Per Bulan Melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda	
293	Jumlah Pelabuhan/Bandara/Terminal di Aceh	
294	Persentase Layanan Angkutan Darat dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Aceh	
295	Rasio Panjang Jalan Jumlah per Jumlah Kendaraan di Aceh	
296	Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Aceh	
297	Jumlah Orang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Aceh	
298	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas Menurut Kabupaten/Kota di Aceh	
299	Jumlah bandara baru yang dibangun	
300	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	
301	Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	
302	Jumlah rute jembatan udara	
303	Jumlah rute subsidi tol laut	
304	Jumlah lokasi yang menerapkan sistem angkutan umum massal	
305	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	

306	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh
307	Panjang jalur kereta api	
308	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan Moda Transportasi Kereta Api	
309	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan Moda Transportasi Kapal Pelayaran Dalam Negeri	
310	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan Moda Transportasi Pesawat Terbang	
311	Jumlah bandara yang aktif beroperasi	
312	RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	
313	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	
314	RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	
315	RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	
316	RKPA yang telah ditetapkan dengan Pergub	
317	Tersedianya sistem perencanaan secara elektronik	
318	Terkendalinya pelaksanaan kegiatan sumber dana APBA	
319	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	
320	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2023-2026	
321	Realisasi dan Proyeksi Dana Otonomi Khusus (OTSUS)	
322	Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari TJSLP/CSR	
323	Proyeksi Pendanaan Pembangunan dari CSO/NGO	
324	Penetapan Indikator Kinerja Utama Aceh Tahun 2023-2026	
325	Sertifikat Lahan masyarakat miskin	Dinas Pertanahan Aceh
326	Persentase penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan	
327	Persentase penyelesaian penetapan lokasi (Pemerintah)	
328	Luas tanah objek reforma agraria yang didistribusi	
329	Angka partisipasi kasar SMA/SMK/SLB	Dinas Pendidikan Aceh
330	Angka pendidikan Tamat SLTA sederajat	
331	Angka pendidikan Tamat SLB	
332	Angka Melanjutkan dari SMA/SMK/SLB	
333	Sekolah pendidikan SMA/SMK/SLB kondisi bangunan baik	
334	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia SMA/SMK/SLB	
335	Guru yang tersertifikasi Jenjang SMA	
336	Guru yang tersertifikasi Jenjang SMK	
337	Guru yang tersertifikasi Jenjang SLB	
338	Sekolah yang terakreditasi A Jenjang SMA	

339	Sekolah yang terakreditasi A Jenjang SMK
340	Angka melek huruf
341	Angka rata-rata lama sekolah
342	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
343	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/SLB Paket C
344	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/SLB Paket C
345	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/SLB
346	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
347	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/SLB
348	Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/SLB
349	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
350	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata
351	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
352	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
353	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
354	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA
355	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi
356	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
357	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Aceh Usia 15 Tahun Ke Atas
358	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
359	Angka Rata-rata Lama Sekolah Aceh dan Rata-Rata Sumatera
360	Angka Harapan Lama Sekolah
361	Angka Usia Harapan Hidup di Aceh
362	Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMA/SMK/SLB Paket C Provinsi Aceh
363	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Aceh Usia 16 – 18 Tahun
364	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SMA/SMK/SLB Sederajat
365	Data Persentase Sertifikasi Guru Jenjang Pendidikan
366	Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMA
367	Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan SMK
368	Data Akreditasi Sekolah Jenjang SMA/SMK/Sederajat
369	Jumlah Keppres GTK
370	Harapan lama sekolah

371	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	
372	Tingkat penyelesaian pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat	
373	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	
374	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ sederajat (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas	
375	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin	
376	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SMA/ sederajat	
377	Angka anak tidak sekolah jenjang SMA/ sederajat	
378	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	
379	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun	
380	Koperasi sehat	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Aceh
381	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	
382	Persentase koperasi aktif	
383	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	
384	Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	
385	Persentase Koperasi Tidak Aktif di Aceh	
386	Data BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro)	
387	Rasio kewirausahaan Aceh	
388	Kontribusi KUMKM Aceh Terhadap pertumbuhan ekonomi	
389	Kontribusi KUMKM Aceh Terhadap ekspor	
390	Jumlah Koperasi modern	
391	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	
392	Persentase pertumbuhan wirausaha	
393	Pertumbuhan wirausaha produktif	
394	Transformasi UKM masuk ke dalam rantai pasok	
395	Pertumbuhan start up	
396	Luas Areal dan Produksi Komoditi Karet Perkebunan Rakyat	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
397	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Karet Perkebunan Rakyat	
398	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Dalam	
399	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Kelapa Dalam Perkebunan Rakyat	
400	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kelapa Sawit	

401	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat
402	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kopi Robusta
403	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Kopi Robusta Perkebunan Rakyat
404	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kopi Arabika
405	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Kopi Arabika Perkebunan Rakyat
406	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kakao Perkebunan Rakyat
407	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Kakao Perkebunan Rakyat
408	Luas Areal dan Produksi Komoditi Cengkeh Perkebunan Rakyat
409	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Cengkeh Perkebunan Rakyat
410	Luas Areal dan Produksi Komoditi Lada Perkebunan Rakyat
411	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Lada
412	Luas Areal dan Produksi Komoditi Jambu Mete
413	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Jambu Mete Perkebunan Rakyat
414	Luas Areal dan Produksi Komoditi Tebu Perkebunan Rakyat
415	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Tebu
416	Luas Areal dan Produksi Komoditi Tembakau Perkebunan Rakyat
417	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Tembakau Perkebunan Rakyat
418	Luas Areal dan Produksi Komoditi Pala Perkebunan Rakyat
419	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Pala
420	Luas Areal dan Produksi Komoditi Pinang Perkebunan Rakyat
421	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Pinang Perkebunan Rakyat
422	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kapuk / Randu Perkebunan Rakyat
423	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Kapuk / Randu Perkebunan Rakyat
424	Luas Areal dan Produksi Komoditi Kemiri Perkebunan Rakyat
425	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Kemiri Perkebunan Rakyat
426	Luas Areal dan Produksi Komoditi Sagu Perkebunan Rakyat
427	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Sagu

428	Luas Areal dan Produksi Komoditi Aren Perkebunan Rakyat
429	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Aren
430	Luas Areal dan Produksi Komoditi Cassiavera Perkebunan Rakyat
431	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Cassiavera Perkebunan Rakyat
432	Luas Areal dan Produksi Komoditi Gambir Perkebunan Rakyat
433	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Gambir Perkebunan Rakyat
434	Luas Areal dan Produksi Komoditi Nilam Perkebunan Rakyat
435	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Nilam Perkebunan Rakyat
436	Luas Areal dan Produksi Komoditi Serewangi Perkebunan Rakyat
437	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Serewangi Perkebunan Rakyat
438	Luas Areal dan Produksi Komoditi Jarak Perkebunan Rakyat
439	Produktivitas dan Jumlah Petani Komoditi Jarak
440	Indeks Pertanaman Padi
441	Luas Lahan Sawah Irigasi
442	Luas Lahan Sawah Non Irigasi
443	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi
444	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Jagung
445	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kedelai
446	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kacang Tanah
447	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kacang Hijau
448	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Ubi Kayu
449	Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Ubi Jalar
450	Jumlah Bantuan Benih Padi dan Jagung
451	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Bawang Merah
452	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Cabe Besar
453	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Cabe Rawit
454	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Tomat

455	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kentang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh
456	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Alpukat	
457	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Durian	
458	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Mangga	
459	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Pisang	
460	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Jeruk	
461	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Jahe	
462	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Kunyit	
463	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Komoditi Temu Lawak	
464	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Kecamatan	
465	Rekap Ketenagaan Penyuluhan Tingkat Kabupaten/Kota	
466	Rekap sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan penyuluhan	
467	Rekap Data Dukung Layanan per Provinsi	
468	Jumlah alokasi pupuk bersubsidi	
469	Jumlah realisasi pupuk bersubsidi	
470	Jumlah Bantuan Pemerintah berupa Pembangunan Sistem Irigasi Perpompaaan dan Perpipaan	
471	Jumlah Realisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	
472	Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	
473	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	
474	ASN yang Tugas Belajar	
475	Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	
476	Data Diklat Aparatur Pemerintah Aceh	
477	Data Jenis Beasiswa Pemerintah Aceh pada berbagai Jenjang Pendidikan	
478	Peningkatan Produksi Daging Peternakan Ruminansia	Dinas Peternakan Aceh
479	Peningkatan Produksi Susu Peternakan Ruminansia	
480	Peningkatan Produksi Daging Unggas Peternakan Non Ruminansia	
481	Peningkatan Produksi Telur Peternakan Non Ruminansia	
482	Nilai Tukar Peternak	

483	Indeks terima peternak	
484	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit Bakteri	
485	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit Parasit	
486	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit Protozoa	
487	Peningkatan Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit Virus	
488	Perkembangan IT dan IB Sektor Peternakan Aceh	
489	Perkembangan Populasi Ternak Sapi Perah, Sapi Potong dan Kerbau per Kabupaten/Kota	
490	Jumlah Ternak yang Dipotong di RPH dan Di Luar RPH yang Dilaporkan	
491	Jumlah Realisasi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau	
492	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh
493	Rasio bayi berakte kelahiran	
494	Rasio pasangan berakte nikah	
495	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
496	Cakupan penerbitan akta kelahiran	
497	Jumlah penduduk pria	
498	Jumlah penduduk wanita	
499	Jumlah kelahiran	
500	Jumlah kematian	
501	Kepemilikan KTP-Elektronik, Akta Kelahiran dan Nikah Penduduk Aceh	
502	Jumlah penduduk Aceh, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota	
503	Distribusi Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Kabupaten/Kota	
504	Angka Pertumbuhan Penduduk	
505	Perkembangan Angka Pertumbuhan Penduduk Aceh	
506	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Dinas Pengairan Aceh
507	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	
508	Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	
509	Persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik	
510	Rasio Jaringan Irigasi	
511	Luas Wilayah Sungai berdasarkan kewenangan	
512	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai	
513	Luas Daerah Irigasi sesuai Kewenangannya	
514	Jenis Irigasi di Aceh dan Luasannya	
515	Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan	

516	Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
517	Lokasi Bangunan Utama Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Aceh	
518	Lokasi Bangunan Utama Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Aceh	
519	Lokasi Bangunan Utama Daerah Irigasi Permukaan yang Sedang Dibangun Kewenangan Provinsi Aceh	
520	Luasan Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Aceh Dalam Hektar	
521	Luasan Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Aceh Dalam Hektar	
522	Luasan Daerah Irigasi Permukaan yang Sedang Dibangun Kewenangan Provinsi Aceh Dalam Hektar	
523	Kondisi Bangunan Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan di Provinsi Aceh	
524	Kondisi Saluran Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan di Provinsi Aceh	
525	Rekapitulasi Luas Daerah Irigasi di Provinsi Aceh	
526	Potensi Danau Aceh	
527	Rekapitulasi Potensi Danau Aceh	
528	Rekapitulasi Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai Aceh	
529	Luas Wilayah Sungai di Provinsi Aceh Berdasarkan Kewenangan	
530	Rasio Jaringan Irigasi Aceh	
531	Data dan Kondisi Kinerja Daerah Irigasi Keseluruhan Kewenangan Provinsi Aceh Menurut Jenisnya	
532	Kondisi Kinerja Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Aceh	
533	Kondisi Kinerja Daerah Irigasi Permukaan yang sedang Dibangun Kewenangan Provinsi Aceh	
534	Kondisi Kinerja Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Aceh	
535	Panjang Saluran Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi Aceh	
536	Panjang Saluran Daerah Irigasi Rawa Kewenangan Provinsi Aceh	
537	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
538	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	
539	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	
540	Rasio KDRT	

541	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
542	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	
543	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (nilai)	
544	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	
545	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun	
546	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan	
547	Jumlah korban kekerasan terhadap anak menurut jenis kekerasan	
548	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai)	
549	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
550	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	
551	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	
552	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan menurut jenis kekerasan yang dialami	
553	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	
554	Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR, DPRD dan DPRK	
555	Jumlah Korban Kekerasan menurut kelompok umur dan jenis kelamin	
556	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Pekerjaan dan Jenis kelamin	
557	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	
558	Jumlah Pelaku Kekerasan menurut kelompok umur dan jenis kelamin	
559	Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Pekerjaan dan Jenis kelamin	
560	Jumlah Pelaku Kekerasan Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	
561	Persentase rumah tangga pengguna listrik	
562	Persentase Pembangkit Listrik dari Energi Baru Terbarukan	
563	Besaran kontribusi sektor pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	
564	Besaran kontribusi sektor Listrik dan Gas	
565	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	
566	Struktur geologi	
567	Potensi geologi	
568	Karakteristik Geologi	
569	Potensi kandungan	
570	kawasan pertambangan	

571	Nilai Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga konstan
572	Nilai Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku
573	Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku
574	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
575	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga konstan (HK)
576	Pertumbuhan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
577	Pertumbuhan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
578	Nilai Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga konstan
579	Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga konstan
580	Nilai sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga berlaku
581	Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga berlaku
582	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
583	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga konstan (HK)
584	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
585	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
586	Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting
587	Rencana Pembangunan Pembangkit
588	Rasio Kelistrikan Aceh
589	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga
590	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Migas
591	Jumlah Badan Usaha Kegiatan Pemroduksian pada
592	Jumlah Badan Usaha yang diawasi Kegiatan Usaha Pengangkutan Migasnya
593	Jumlah rekomendasi teknis di bidang jasa usaha pertambangan yang dikeluarkan

594	Jumlah Peserta Diklat Masyarakat Bidang Minyak dan Gas Bumi	
595	Jumlah Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	
596	Jumlah usaha yang dibina subsektor mineral dan batubara	
597	Jumlah Produksi Tenaga Listrik	
598	Kapasitas terpasang pembangkit EBT	
599	Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	
600	Porsi EBT dalam bauran energi nasional	
601	Jumlah pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)	
602	Jumlah penerima subsidi listrik	
603	Kuota LPG 3 KG	
604	Realisasi penjualan LPG 3 KG	
605	Bauran energi terbarukan	
606	Rasio elektrifikasi	
607	Produksi Tahunan (Tahun Kalender) Menurut Jenis Bahan Tambang	
608	Banyaknya Usaha/Perusahaan Penggalian	
609	Volume Produksi Bahan Galian Usaha/Perusahaan	
610	Nilai Produksi Bahan Galian Usaha/Perusahaan	
611	Jumlah Supply energi listrik aceh	
612	Kebutuhan energi listrik di aceh	
613	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
614	SILPA terhadap APBD	
615	PAD terhadap pendapatan	
616	Belanja pendidikan (20%)	
617	Belanja kesehatan (10%)	
618	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	
619	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD	
620	Bagi hasil kabupaten/kota	
621	APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	
622	Kab/Kota yang memperoleh Opini WTP	
623	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Aceh (unit)	
624	Predikat WTP Kabupaten Kota	
625	Pengesahan APBA Tahunan	
626	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh	
627	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Aceh	
628	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Aceh (PAA)	
629	Anggaran dan Realisasi Pajak Aceh	
630	Anggaran dan Realisasi Retribusi Aceh	

631	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Keuangan yang Dipisahkan dan Hasil Penyertaan Modal Aceh	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh
632	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAA yang Sah	
633	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan	
634	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)	
635	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)	
636	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak	
637	Anggaran dan Realisasi Otonomi Khusus	
638	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Aceh yang Sah	
639	Realisasi Belanja Aceh per tahun	
640	Realisasi Kelompok Belanja Aceh	
641	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Aceh	
642	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Aceh	
643	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Aceh	
644	Kondisi Aset Lancar Pemerintah Aceh	
645	Kondisi Aset Tidak Lancar Pemerintah Aceh	
646	Kondisi Aset Tetap Pemerintah Aceh Per 31 Desember	
647	Kondisi Dana Cadangan Pemerintah Aceh	
648	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Aceh	
649	Proyeksi Pajak Aceh Tahun 2023-2026	
650	Proyeksi Retribusi Aceh Tahun 2023-2026	
651	Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Aceh yang Dipisahkan Tahun 2023-2026	
652	Proyeksi Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023-2023	
653	Proyeksi Kelompok Lain-Lain PAA yang Sah Tahun 2023-2026	
654	Proyeksi Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023-2026	
655	Proyeksi Dana Perimbangan Tahun 2023-2026	
656	APBD tingkat kabupaten	
657	APBD untuk keberlanjutan/ lingkungan hidup	
658	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	
659	Cakupan pembinaan atlet muda	
660	Jumlah atlet berprestasi	
661	Jumlah prestasi olahraga	
662	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	
663	Lapangan olahraga	
664	Jumlah gedung olahraga	
665	Persentase organisasi pemuda yang aktif	
666	Persentase wirausaha muda	
667	Cakupan pembinaan olahraga	

668	Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan	Inspektorat Aceh
669	Cabang Olahraga Atlit dan Infrastruktur Olahraga Aceh	
670	Data Peserta Pameran Pilot Proyek Sentra Pemberdayaan Pemuda bidang Teknologi Tepat Guna	
671	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	
672	Pemuda yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Toleransi dan Moderasi Beragama	
673	Provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam Pilot Proyek Sentra Pemberdayaan Pemuda berbasis IPTEK	
674	Jumlah pengelola/wirausaha industri olahraga yang mendapat pengetahuan/bimtek tentang industri olahraga	
675	Jumlah provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang	
676	Jumlah SKP yang terfasilitasi pengembangan kewirausahaan	
677	Meningkatnya Jumlah SKP	
678	Tersusunnya laporan hasil perbaikan ekosistem Kewirausahaan Pemuda	
679	Tersusunnya NSPK pengembangan Kewirausahaan Pemuda	
680	Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Permodalan	
681	Lembaga Kepemudaan yang Terfasilitasi Bantuan Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila	
682	Lembaga Kepemudaan yang Terfasilitasi Bantuan Pembentuk Kelompok Pemuda Anti Narkoba	
683	Pemuda Kader yang terfasilitasi Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Anti Faham Radikalisme	
684	Provinsi dengan Wawasan Pemuda yang Meningkatkan	
685	Sport Development Index (SDI)	
686	Jumlah Pemuda Penerima Bantuan Pemerintah Untuk Tenaga Kepemudaan Formal/Bantuan Penyelesaian Karya Ilmiah Tingkat Akhir	
687	Jumlah Yayasan/Lembaga Penerima Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pemberdayaan Pemuda	
688	Jumlah Yayasan/Lembaga/Pemuda Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pemuda	
689	Data Peserta Program Wirausaha Muda Berprestasi (Grand Finalis)	
690	Data Peserta Program Wirausaha Muda Pemula	
691	Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	
692	Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Inspektorat Aceh	

693	Perkembangan Tindak Lanjut Temuan Itjen Kemendagri	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh
694	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	
695	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	
696	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	
697	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	
698	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	
699	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	
700	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	
701	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	
702	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	
703	Pelayanan Kepustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
704	Data Jumlah pengunjung dan data pendukung pada Perpustakaan Provinsi Aceh per tahun	
705	Data Arsip per tahun	
706	Pelayanan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
707	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
708	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	
709	Persentase Penegakan PERDA	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh
710	Jumlah Penyelesaian Perkara yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh Menurut Jenis Kasus	
711	Jumlah Penyelesaian Perkara yang Ditangani Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Provinsi Aceh Menurut Jenis Kasus	
712	Angka partisipasi angkatan kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh
713	Tingkat partisipasi angkatan kerja	
714	Tingkat pengangguran terbuka	
715	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	
716	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	
717	Keselamatan dan perlindungan	
718	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	
719	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	
720	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	
721	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	
722	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	
723	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	

724	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
725	Rasio penduduk yang bekerja
726	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
727	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
728	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
729	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
730	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar, dan Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh
731	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh
732	Jumlah Angkatan Kerja dan Pencari Kerja yang Belum Ditempatkan Menurut Kabupaten/Kota
733	Produktivitas Tenaga Kerja Aceh
734	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik
735	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan
736	Lapangan Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Daerah
737	Dampak Covid-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal
738	Data Lowongan pekerjaan terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan
739	Data Pencari kerja terdaftar pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan
740	Data Tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan pada Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan
741	Data Tenaga Kerja Tersertifikasi
742	Data Lembaga Pelatihan Kerja
743	Data Peserta Pelatihan berbasis kompetensi (PBK)
744	Data Peserta Pemagangan Luar Negeri
745	Data Peserta Pemagangan Dalam Negeri
746	Data Lembaga K3
747	Data Perusahaan yang Disidik
748	Data Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas
749	Jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan menjadi calon Wirausaha
750	Data Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan
751	Jumlah perusahaan yang berperan memperkerjakan penyandang disabilitas
752	Data Perusahaan Jasa K3

753	Data Informasi Jabatan	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh
754	Jumlah perusahaan yang menerapkan SMK3	
755	Data Peserta BPJS ketenagakerjaan	
756	Jumlah perusahaan yang mendapatkan uji K3	
757	Indeks Balas Jasa dan Upah Konstruksi	
758	Indeks Hari-Orang (Mandays) Konstruksi	
759	Indeks Nilai Konstruksi yang Diselesaikan	
760	Indeks Pekerja Tetap Konstruksi	
761	Penyediaan lapangan kerja per tahun	
762	Banyaknya Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
763	Banyaknya Pengeluaran untuk Tenaga Kerja Industri Manufaktur Skala Menengah dan Besar	
764	Banyaknya Pekerja Dirinci Atas Pendidikan dan Kewarganegaraan pada Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
765	Pertumbuhan wirausaha	
766	Rasio kewirausahaan nasional	
767	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	
768	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	
769	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	
770	Upah rata-rata per jam pekerja.	
771	Persentase setengah pengangguran.	
772	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	
773	Data calon transmigrasi yang telah difasilitasi pelatihan dan sertifikat	
774	Data Persebaran Lokasi Transmigrasi	
775	Data Persebaran Kawasan Transmigrasi	
776	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	
777	Partisipasi angkatan kerja perempuan	
778	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET)	
779	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Aceh
780	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	
781	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	
782	Jumlah Lembaga Penanganan Korban Konflik	
783	Aspek Utama Reintegrasi	
784	Jumlah pelanggaran Syariah Islam Aceh Besar dan Banda Aceh 5 tahun terakhir	
785	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	

786	Tersedianya dokumen RPPLH Provinsi
787	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi
788	Peningkatan Indeks Kualitas Air
789	Peningkatan Indeks Kualitas Udara
790	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
791	Laporan Inventarisasi GRK
792	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
793	Kerusakan Kawasan Hutan
794	Rasio luas kawasan lindung
795	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi
796	Tersedianya dokumen RPPLH daerah
797	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan pemerintah daerah
798	Tersedianya dokumen KLHS pemerintah daerah
799	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat pemerintah daerah
800	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pemerintah daerah
801	Jumlah limbah B3 yang dikelola
802	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur
803	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
804	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
805	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)
806	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional
807	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional
808	Penetapan hak MHA
809	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA
810	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana MHA
811	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan MHA
812	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
813	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah
814	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di pemerintah daerah

815	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di pemerintah daerah
816	Timbulan sampah yang ditangani
817	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R
818	Persentase cakupan area pelayanan
819	Persentase jumlah sampah yang tertangani
820	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
821	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan
822	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
823	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
824	Rehabilitasi hutan
825	Rehabilitasi lahan kritis
826	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
827	Jumlah Timbulan Sampah (m3/Hari)
828	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
829	Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Aceh (ha)
830	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKAL)
831	Luas RTH pada Kabupaten/Kota
832	Penerima Penghargaan LH Tingkat Provinsi Aceh
833	Peringkat Proper untuk Perusahaan di Provinsi Aceh
834	Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh
835	Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Aceh Berdasarkan Luas dan Fungsi
836	Wilayah Kelola KPH Berdasarkan Kelompok DAS dan Administratif
837	Kelas Penutupan Lahan
838	Luas Deforestasi Aceh
839	Kebakaran Hutan Dan Lahan Aceh
840	Data Konflik antara Manusia dan Satwa Liar di Aceh
841	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh
842	Penyelesaian konflik tenurial melalui Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) menurut Kabupaten/Kota di Aceh
843	Data Perambahan Kawasan Hutan Aceh
844	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Aceh
845	Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan ADHB (dalam Miliar Rupiah)

846	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan
847	Emisi dari deforestasi dan degradasi hutan tahunan
848	List Kabupaten yang memiliki dokumen DDDTLH kabupaten
849	List Kabupaten yang memiliki dokumen RPPLH kabupaten
850	Luas area kebakaran hutan dan lahan di kabupaten
851	Tingkat Emisi Rujukan Deforestasi dan Degradasi Hutan (FREL) kabupaten
852	Total hutan produksi di kabupaten
853	Progres Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
854	Jumlah lulusan SMK Kehutanan Negeri yang kompeten dan bersertifikat
855	Jumlah lulusan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha
856	Jumlah Pembentukan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS
857	Jumlah UMKM Kehutanan yang difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi/pemilikan legalitas kayu
858	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang kelasnya naik menjadi Gold/Platinum
859	Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS
860	Rencana Kerja/Pengelolaan Perhutanan Sosial yang disahkan
861	Jumlah Standar Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diproduksi BSILHK
862	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
863	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)
864	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
865	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)
866	Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri
867	Data Daftar Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu
868	Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa
869	Indeks tutupan hijau pegunungan
870	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun
871	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister
872	Jumlah KPHL yang masuk Kategori KPHL Efektif Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
873	Jumlah KPHP yang masuk Kategori KPHP Efektif Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari
874	Jumlah penanganan kasus Illegal Logging

875	Jumlah penanganan kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)	Dinas Syariat Islam Aceh
876	Jumlah penanganan kasus Pencemaran / Perusakan Lingkungan	
877	Jumlah penanganan kasus Perambahan	
878	Jumlah penanganan kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL	
879	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO	
880	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	
881	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas peduli dan berbudaya lingkungan hidup	
882	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	
883	Kerangka legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasive (JAI)	
884	Limbah B3 yang dihasilkan per kapita	
885	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)	
886	Persentase limbah cair industri cair yang diolah secara aman	
887	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri	
888	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline	
889	Persentase sampah nasional yang terkelola	
890	Persentase sisa makanan	
891	Persentase penurunan sampah terbuang ke laut	
892	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan	
893	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan/lahan kritis	
894	Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya	
895	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	
896	Volume produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK)	
897	Volume produksi kayu bulat	
898	Volume produksi kayu olahan	
899	Neraca Aset Lingkungan (Neraca Sumberdaya Alam)	
900	Neraca emisi Gas Rumahkaca (GRK)	
901	Data UMKM binaan KLHK	
902	Indeks Pembangunan Syariat Islam	
903	Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	
904	Hafiz Alqur'an	
905	Indeks Melek Alqur'an	

906	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat	
907	Jumlah Dai di Wilayah Perbatasan dan Daerah Terpencil	
908	Data Mesjid Se-Aceh	
909	Pemahaman terhadap Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	Sekretariat Majelis Adat Aceh
910	Jumlah Penghimpunan Zakat & Infak	Sekretariat Baitul Mal Aceh
911	Jumlah Zakat & Infak yang disalurkan	
912	Rasio Zakat & Infak yang disalurkan terhadap Zakat & Infak yang dikumpulkan	
913	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kilo Kalori Per Hari)	Dinas Pangan Aceh
914	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum (dibawah 1500 kkal/kapita/hari)	
915	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	
916	Penguatan cadangan pangan	
917	Penanganan daerah rawan pangan (prioritas 1,2,3)	
918	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	
919	Ketersediaan pangan pokok	
920	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	
921	Monitoring Stok Pangan Strategis (Penggilingan/Pedagang)	
922	Data Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	
923	Data Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	
924	Data Stok pada Lumbung Pangan Pemerintah Aceh	
925	Database Kemananan Pangan Segar (OKKP)	
926	Harga Pangan Pokok Strategis Tingkat Produsen dan Konsumen per tahun	
927	Perkembangan Konsumsi Pangan (Skor PPH)	
928	Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok	
929	Neraca Bahan Makanan (NBM)	
930	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	
931	Fatwa yang ditetapkan per tahun	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
932	Sertifikat Produk Halal Yang diterbitkan per tahun	
933	Data Pendidikan Kader Ulama	
934	Jumlah saran/pertimbangan dan rekomendasi per tahun	
935	Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
936	Produksi Perikanan Budidaya	
937	Produksi Garam	
938	Konsumsi ikan	
939	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	
940	Luasan kawasan konservasi	

941	Nilai tukar nelayan	
942	Kawasan pesisir	
943	Kawasan kepulauan	
944	Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya	
945	Kawasan Perikanan	
946	Cakupan bina kelompok nelayan	
947	Produksi UPI	
948	Perlindungan, Pelestarian dan Pemanfaatan Jenis Ikan Yang dilindungi/ Genetik Ikan	
949	Kelompok Masyarakat Pengawas	
950	Obat Ikan	
951	Penyakit Ikan	
952	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)	
953	Luas Kawasan Konservasi	
954	Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	
955	Jenis Pakan Ikan	
956	Jumlah Produksi Garam	
957	Angka Konsumsi Ikan	
958	Perizinan Usaha Penangkapan Ikan dan Kapal Perikanan	
959	Pelabuhan Perikanan	
960	Penetapan Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
961	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh
962	Rumah layak huni bagi masyarakat miskin	
963	Persentase penduduk berakses air minum	
964	Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
965	Persentase permohonan kesesuaian ruang terhadap RTRW	
966	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan (km) di Provinsi Aceh	
967	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan (km) di Provinsi Aceh	
968	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) di Provinsi Aceh	
969	Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap	
970	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	
971	Kinerja Ruas Jalan Strategis MYC	
972	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Aceh	
973	Luasan RTH Publik di Aceh Tahun 2013-2021	
974	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
975	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	
976	Persentase Perangkat daerah yang menggunakan sandi	
977	Cakupan Layanan Telekomunikasi	
978	Persentase penduduk yang menggunakan HP	
979	Persentase penduduk yang menggunakan Telepon	

980	Nilai Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga	
981	Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga konstan	
982	Nilai Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga	
983	Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga berlaku	
984	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)	
985	Persentase perkembangan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga konstan (HK)	
986	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)	
987	Pertumbuhan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)	
988	Batas wilayah administrasi	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
989	Data Kerjasama antar daerah	
990	Jumlah Reusam yang disahkan per tahun	Keurukon Katibul Wali
991	Jumlah majelis fatwa, tuha peut, tuha lapan	
992	Jumlah pemberian gelar/anugerah kehormatan	
993	Data Pasien Rawat Inap	Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh
994	Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan	
995	Jumlah Pasien Rawat Inap	
996	Data 10 besar penyakit	
997	Jumlah Tempat tidur	
998	Jumlah Pengisian tempat Tidur (Bed Occupation Rate)	
999	Lamanya Rawatan (Length Of Stay)	
1000	Jumlah tenaga Sesuai dengan Profesi	
1001	Data Pasien Rawat Inap	Rumah Sakit Jiwa Aceh
1002	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan	
1003	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap	
1004	Data 10 besar penyakit	
1005	Jumlah Tempat tidur	
1006	Jumlah Pengisian tempat Tidur (Bed Occupation Rate)	
1007	Lamanya Rawatan (Length Of Stay)	
1008	Jumlah tenaga Sesuai dengan Profesi	
1009	Data Pasien Rawat Inap	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin
1010	Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan	
1011	Jumlah Pasien Rawat Inap	
1012	Data 10 besar penyakit	
1013	Jumlah Tempat tidur	
1014	Jumlah Pengisian tempat Tidur (Bed Occupation Rate)	
1015	Lamanya Rawatan (Length Of Stay)	
1016	Jumlah tenaga Sesuai dengan Profesi	

1017	Indeks Kemahalan Konstruksi	Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh
1018	Direktori Perusahaan Konstruksi Skala Kecil	
1019	Direktori Perusahaan Konstruksi Skala Menengah	
1020	Direktori Usaha Konstruksi Skala Perorangan	
1021	Jumlah Perusahaan Konstruksi Skala Kecil	
1022	Jumlah Perusahaan Konstruksi Skala Menengah	
1023	Jumlah Usaha Konstruksi Skala Perorangan	
1024	Gedung dan Bangunan Terbangkalai (tidak fungsional)	
1025	Bangunan dan Gedung Terbangkalai kewenangan Kabupaten/Kota	Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh
1026	Jumlah Pidato Pimpinan yang disusun	
1027	Jumlah makalah/paparan yang difasilitasi	
1028	Jumlah testimoni narasi video pimpinan yang disiapkan	
1029	Jumlah kegiatan fasilitasi keprotokolan pimpinan	
1030	Jumlah penyampaian aspirasi masyarakat yng terfasilitasi	
1031	Jumlah berita yang dirilis	
1032	Jumlah dokumentasi video pimpinan	
1033	Qanun Aceh Implementasi UUPA yang belum ditetapkan dan diundangkan	Biro Hukum Setda Aceh
1034	Jumlah Qanun yang ada	
1035	Jumlah Penerbitan Pergub dalam setahun dan turunannya	
1036	Data Kegiatan Bantuan Hukum Nonlitigasi	
1037	Data Penerima Bantuan Hukum Litigasi	
1038	Jumlah Kantong Darah per Tahapan	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh
1039	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemahasiswaan	
1040	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Ormas/Yayasan Masyarakat	
1041	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Aceh dan Kab/Kota	Biro Organisasi Setda Aceh
1042	Jumlah organisasi perangkat daerah Provinsi	
1043	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Kab/Kota	
1044	Jumlah paket lelang kecil dan non kecil (konstruksi, pengadaan dan konsultasi) 5 tahun terakhir	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh
1045	Jumlah Pasar Murah dalam setahun	Biro Perekonomian Setda Aceh
1046	Jumlah Alokasi Kuota LPG 3 kg	
1047	Jumlah Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
1048	Jumlah Pemakaian Gedung BMA dalam 5 tahun	Biro Umum Setda Aceh
1049	Jumlah Pemakaian Gedung Serba Guna	
1050	Daftar Informasi Kantor Penghubung	Badan Penghubung Pemerintah Aceh
1051	Rekapitulasi Data Pengunjung Domestik dan Asing di Anjungan Pemerintah Aceh (TMII)	

1052	Data Pemulangan Masyarakat Aceh (Nelayan) yang Di Fasilitas BPPA dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
1053	Data Pemulangan Masyarakat Aceh (Jenazah) yang Di Fasilitas BPPA
1054	Data Pemulangan Masyarakat Aceh (Warga Aceh Terlantar) yang di Fasilitas BPPA
1055	Data Pemulangan Masyarakat Kurang Mampu yang di Fasilitas BPPA
1056	Data Penghuni Rumah Singgah
1057	Database Masyarakat Aceh Perantauan
1058	Data Kegiatan Gubernur Aceh
1059	Data Kegiatan Badan Penghubung (Pejabat)
1060	Database Bisnis Masyarakat Aceh Perantauan

LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR : 25/INSTR/2022

NO	DATA GEOSPASIAL	SKPA
1	2	4
1	Peta Sarana Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2008	Dinas Kesehatan Aceh
2	Peta Sarana Kesehatan Aceh Barat Tahun 2008	
3	Peta Sarana Kesehatan Aceh Barat Daya Tahun 2008	
4	Peta Sarana Kesehatan Aceh Besar Tahun 2008	
5	Peta Sarana Kesehatan Aceh Jaya Tahun 2008	
6	Peta Sarana Kesehatan Aceh Selatan Tahun 2008	
7	Peta Sarana Kesehatan Aceh Singkil Tahun 2008	
8	Peta Sarana Kesehatan Aceh Tamiang Tahun 2008	
9	Peta Sarana Kesehatan Aceh Tenggara Tahun 2008	
10	Peta Sarana Kesehatan Aceh Timur Tahun 2008	
11	Peta Sarana Kesehatan Aceh Utara Tahun 2008	
12	Peta Sarana Kesehatan Banda Aceh Tahun 2008	
13	Peta Sarana Kesehatan Bener Meriah Tahun 2008	
14	Peta Sarana Kesehatan Bireuen Tahun 2008	
15	Peta Sarana Kesehatan Gayo Lues Tahun 2008	
16	Peta Sarana Kesehatan Langsa Tahun 2008	
17	Peta Sarana Kesehatan Lhokseumawe Tahun 2008	
18	Peta Sarana Kesehatan Nagan Raya Tahun 2008	
19	Peta Sarana Kesehatan Pidie Tahun 2008	
20	Peta Sarana Kesehatan Pidie Jaya Tahun 2008	
21	Peta Sarana Kesehatan Kota Sabang Tahun 2008	
22	Peta Sarana Kesehatan Subulussalam Tahun 2008	
23	Peta Sebaran Kasus Positif Malaria di Kab. Bireuen tahun 2014	
24	Peta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aron Lhokseumawe	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh
25	Peta Sebaran Kegiatan Industri skala 1:50.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
26	Peta Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri skala 1:50.000	
27	Peta Kawasan Industri Eksisting dan Peta Kawasan Industri Rencana skala 1:50.000	
28	Peta Sebaran Kondisi yang Membahayakan Jiwa Manusia	Badan Penanggulangan Bencana Aceh
29	Peta Kerentanan Likuifaksi	
30	Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000	
31	Peta Kawasan Rawan Bencana Tsunami	
32	Peta Kerentanan Likuefaksi	
33	Peta Resiko Bencana	
34	Peta Rawan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh
35	Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan skala 1:50.000	Dinas Perhubungan Aceh

36	Peta Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) skala 1:5.000
37	Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000
38	Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000
39	Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000
40	Peta Alur Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan skala 1:50.000
41	Peta Sebaran Jaringan Rel dan Stasiun Kereta Api skala 1:50.000
42	Peta Sebaran Pelabuhan Sungai skala 1:50.000
43	Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000
44	Peta Sebaran Terminal Barang skala 1:50.000
45	Peta Sebaran Titik Halte Sungai-Danau skala 1:50.000
46	Peta Sebaran Titik Rambu Sungai-Danau skala 1:50.000
47	Peta Sebaran Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) skala 1:50.000
48	Peta Alur Pelayaran Pelabuhan Laut dan Penyeberangan
49	Peta Runway Bandara
50	Peta Kawasan Terminal Khusus
51	Peta Trayek AKDP Non KUGI
52	Peta Trayek AKAP Non KUGI
53	Peta Sebaran Terminal Bus PT 250k
54	Peta Sebaran Stasiun Kereta Api PT 250k
55	Peta Rel Kereta Api LN 250k
56	Peta Sebaran Pengujian Kendaraan PT 250k
57	Peta DEPOKA AR 250k
58	Peta DEPOKA PT 250k
59	Peta Jaringan Transportasi Laut Aceh
60	Peta Kawasan Pelabuhan Aceh (Laut dan Penyeberangan)
61	Peta Titik Terminal Penumpang Provinsi Aceh
62	Peta Koridor dan Rute Feeder Trans Kutaraja
63	Peta Sebaran Terminal Tipe A di Aceh
64	Peta Sebaran Halte Trans Kutaraja
65	Peta Sebaran Terminal Tipe B di Aceh
66	Peta Pelabuhan Penyeberangan di Aceh
67	Peta Penggunaan Nasional Aceh Barat 2006 AR 50k
68	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2016 AR 250k
69	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2016 AR 250k
70	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2014 AR 250k
71	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2013 AR 250k
72	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2012 AR 250k
73	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2011 AR 250k
74	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2009 AR 250k
75	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2006 AR 250k

Dinas Pertanahan Aceh

76	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2003 AR 250k
77	Peta Penggunaan Nasional Aceh 2000 AR 250k
78	Peta Penggunaan Nasional Aceh 1996 AR 250k
79	Peta Penggunaan Nasional Aceh 1990 AR 250k
80	Peta Penggunaan Nasional Subulussalam 2011 AR 50k
81	Peta Penggunaan Nasional Subulussalam 2006 AR 50k
82	Peta Penggunaan Nasional Sabang 2011 AR 50k
83	Peta Penggunaan Nasional Sabang 2006 AR 50k
84	Peta Penggunaan Nasional Pidie Jaya 2011 AR 50k
85	Peta Penggunaan Nasional Pidie Jaya 2006 AR 50k
86	Peta Penggunaan Nasional Pidie 2011 AR 50k
87	Peta Penggunaan Nasional Pidie 2006 AR 50k
88	Peta Penggunaan Nasional Nagan Raya 2011 AR 50k
89	Peta Penggunaan Nasional Nagan Raya 2006 AR 50k
90	Peta Penggunaan Nasional Bireuen 2011 AR 50k
91	Peta Penggunaan Nasional Bireuen 2006 AR 50k
92	Peta Penggunaan Nasional Aceh Timur 2011 AR 50k
93	Peta Penggunaan Nasional Aceh Tengah 2011 AR 50k
94	Peta Penggunaan Nasional Aceh Tamiang 2011 AR 50k
95	Peta Penggunaan Nasional Aceh Tamiang 2006 AR 50k
96	Peta Penggunaan Nasional Aceh Singkil 2011 AR 50k
97	Peta Penggunaan Nasional Aceh Singkil 2006 AR 50k
98	Peta Penggunaan Nasional Aceh Selatan 2011 AR 50k
99	Peta Penggunaan Nasional Aceh Selatan 2006 AR 50k
100	Peta Penggunaan Nasional Aceh Barat Daya 2011 AR 50k
101	Peta Penggunaan Nasional Aceh Barat 2011 AR 50k
102	Peta Kontur Provinsi Aceh
103	Peta Kontur Kabupaten Aceh Barat
104	Peta Kontur Kabupaten Aceh Barat Daya
105	Peta Kontur Kabupaten Aceh Besar
106	Peta Kontur kabupaten Aceh Jaya
107	Peta Kontur Kabupaten Aceh Selatan
108	Peta Kontur Kabupaten Aceh Singkil
109	Peta Kontur Kabupaten Aceh Tamiang
110	Peta Kontur Kabupaten Aceh Tengah
111	Peta Kontur Kabupaten Aceh Tenggara
112	Peta Kontur Kabupaten Aceh Timur
113	Peta Kontur Kabupaten Aceh Utara
114	Peta Kontur Kota Banda Aceh
115	Peta Kontur Kabupaten Bener Meriah
116	Peta Kontur Kabupaten Bireuen
117	Peta Kontur Kabupaten Gayo Lues
118	Peta Kontur Kota Langsa
119	Peta Kontur Kota Lhokseumawe

120	Peta Kontur Kabupaten Nagan Raya	
121	Peta Kontur Kabupaten Pidie	
122	Peta Kontur Kabupaten Pidie Jaya	
123	Peta Kontur Kota Sabang	
124	Peta Kontur Kabupaten Simeulue	
125	Peta Kontur Kota Subulussalam	
126	Peta Jenis Tanah Provinsi Aceh	
127	Peta Tekstur Tanah Provinsi Aceh	
128	Peta Sarana Pendidikan Aceh Barat Tahun 2008	
129	Peta Sarana Pendidikan Aceh Barat Daya Tahun 2008	
130	Peta Sarana Pendidikan Aceh Besar Tahun 2008	Dinas Pendidikan Aceh
131	Peta Sarana Pendidikan Aceh Jaya Tahun 2008	
132	Peta Sarana Pendidikan Aceh Selatan Tahun 2008	
133	Peta Sarana Pendidikan Aceh Singkil Tahun 2008	
134	Peta Sarana Pendidikan Aceh Tamiang Tahun 2008	
135	Peta Sarana Pendidikan Aceh Tengah Tahun 2008	
136	Peta Sarana Pendidikan Aceh Tenggara Tahun 2008	
137	Peta Sarana Pendidikan Aceh Timur Tahun 2008	
138	Peta Sarana Pendidikan Aceh Utara Tahun 2008	
139	Peta Sarana Pendidikan Bener Meriah Tahun 2008	
140	Peta Sarana Pendidikan Bireuen Tahun 2008	
141	Peta Sarana Pendidikan Gayo Lues Tahun 2008	
142	Peta Sarana Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2008	
143	Peta Sarana Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2008	
144	Peta Sarana Pendidikan Kota Langsa Tahun 2008	
145	Peta Sarana Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2008	
146	Peta Sarana Pendidikan Nagan Raya Tahun 2008	
147	Peta Sarana Pendidikan Pidie Tahun 2008	
148	Peta Sarana Pendidikan Pidie Jaya Tahun 2008	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
149	Peta Lahan Gambut skala 1:50.000	
150	Peta Lahan Perkebunan skala 1:50.000	
151	Peta Lahan Pertanian Hortikultura skala 1:50.000	
152	Peta Tanah Semi-Detail skala 1:50.000	
153	Peta Cetak Sawah Indonesia skala 5:000	
154	Peta Tutupan Kelapa Sawit Indonesia minimal skala 1:50.000	
155	Peta Produksi Karet	
156	Peta Pertanian Lahan Basah	Dinas Peternakan Aceh
157	Peta Kawasan Peternakan	
158	Peta Rencana Sungai Non KUGI	Dinas Pengairan Aceh
159	Peta Bendungan AR 250k	
160	Peta Sungai AR 250k	
161	Peta Sawah Beririgasi di Provinsi Aceh	
162	Peta Sebaran Embung dan Waduk	
163	Peta Saluran Iringan Kewenangan Provinsi RPSDA	

164	Peta Luas Sawah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh
165	Peta DAS 4 WS	
166	Peta Bangunan Irigasi Kewenangan Provinsi RPSDA	
167	Peta Cekungan Air Tanah minimal skala 1:250.000	
168	Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000	
169	Peta KRB Gempa Bumi skala 1:50.000	
170	Peta Lokasi Kilang Minyak skala 1:50.000	
171	Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000	
172	Peta Perizinan berusaha di bidang pertambangan skala 1:50.000	
173	Peta Hidrogeologi skala 1:100.000	
174	Peta Infrastruktur Pipa Gas Bumi skala 1:50.000	
175	Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000	
176	Peta Sebaran Terminal Bahan Bakar Minyak dan Terminal LPG skala 1:50.000	
177	Peta Wilayah Kerja dan Wilayah Penugasan Panas Bumi	
178	Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000	
179	Peta Kawasan Cagar Alam Geologi	
180	Peta Geologi Provinsi Aceh	
181	Peta Sesar Provinsi Aceh	
182	Peta LPPMHT Non KUGI	
183	Peta Kabel Bawah Laut LN 250k	
184	Peta Jaringan Telekomunikasi LN 250k	
185	Peta Air Minum LN 250k	
186	Peta Gen Listrik PT 250k	
187	Peta Gardu Listrik PT 250k	
188	Peta Pipa Hidrokarbon Rencana Jaringan Pipa Gas LN 250k	
189	Peta Pipa Hidrokarbon Jaringan Pipa Gas LN 250k	
190	Peta Kabel Listrik Jaringan SUTT LN 250k	
191	Peta Kabel Listrik Jaringan SUTET LN 250k	
192	Peta Kabel Listrik Jaringan Listrik LN 250k	
193	Peta Kabel Listrik Jaringan SUTET LN 250k	
194	Peta Kabel Listrik Jaringan Listrik LN 250k	
195	Peta Geomorfologi Provinsi Aceh	
196	Peta Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Milik Negara	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
197	Peta Kawasan Berikat dan Kawasan Lainnya di bawah Pengawasan Pabean skala 1:50.000	
198	Peta Hak Penggunaan Lahan	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
199	Peta Kawasan Transmigrasi	
200	Peta Sebaran Lokasi Transmigrasi Aceh	
201	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi	
202	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi	
203	Peta Sebaran BLK	
204	Peta Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh

205	Peta Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)	
206	Peta Telaahan Perizinan, Perhutanan Sosial, dan Status Kawasan Hutan	
207	Peta Wilayah Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah 1-6 + UPTD Tahura PMI	
208	Peta Sebaran TPA	
209	Peta RTH	
210	Peta Pemukiman Dai	Dinas Syariat Islam Aceh
211	Peta Kawasan Mesjid	
212	Peta Lokasi Wakaf Produktif	Sekretariat Baitul Mal Aceh
213	Peta Distribusi Zakat	
214	Peta Distribusi Infak	
215	Peta Pengumpulan Zakat Infak	
216	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FoodSecurity and Vulnerability Atlas - FSVA)	Dinas Pangan Aceh
217	Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
218	Peta Lahan Garam	
219	Peta Lahan Pembudidayaan Ikan	
220	Peta Lokasi Pelabuhan Perikanan	
221	Peta Rencana Tata Ruang Laut	
222	Peta Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat	
223	Peta Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan	
224	Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan	
225	Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik	
226	Peta Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat	
227	Peta Sebaran Biota Laut Dilindungi	
228	Peta Bagian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)	
229	Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi	
230	Peta Daerah Penangkapan Ikan	
231	Peta Infrastruktur Umum Sistem Sarana dan Prasarana PT	
232	Peta Infrastruktur Umum Pelabuhan Perikanan PT 250k	
233	Peta Garis Pantai Provinsi Aceh	
234	Peta Laut Provinsi Aceh	
235	Peta Wilayah Laut Kewenangan Provinsi Aceh	
236	Peta Sistem Perkotaan Non KUGI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh
237	Peta Pertahanan Keamanan PT 250k	
238	Peta Cagar Budaya AR 250k	
239	Peta Jalan LN 250k	
240	Peta Rencana Struktur Ruang Kawasan Wisata	
241	Peta Rencana Struktur Ruang Titik HANKAM	

242	Peta RZ KPU Non KUGI
243	Peta KKP AR 250k
244	Peta Strategis Tertentu KSNT AR 250k
245	Peta Strategis Tertentu KSN AR 250k
246	Peta Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Aceh
247	Peta Titik Pusat Kecamatan Provinsi Aceh
248	Peta Titik Pusat Kabupaten Provinsi Aceh
249	Peta Titik Pusat Pulau-pulau Provinsi Aceh
250	Peta Titik Desa Provinsi Aceh 2006
251	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Barat Daya
252	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Barat
253	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Besar
254	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Jaya
255	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Selatan
256	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Singkil
257	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Tamiang
258	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Tengah
259	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Tenggara
260	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Timur
261	Peta Titik Desa Kabupaten Aceh Utara
262	Peta Titik Desa Kota Banda Aceh
263	Peta Titik Desa Kabupaten Bener Meriah
264	Peta Titik Desa Kabupaten Bireuen
265	Peta Titik Desa Kabupaten Gayo Lues
266	Peta Titik Desa Kota Langsa
267	Peta Titik Desa Kota Lhokseumawe
268	Peta Titik desa Kabupaten Nagan Raya
269	Peta Titik Desa Kabupaten Pidie Jaya
270	Peta Titik Desa Kabupaten Pidie
271	Peta Titik Desa Kota Sabang
272	Peta Titik Desa Kabupaten Simeulue
273	Peta Titik Desa Kota Subulussalam
274	Peta Batas Wilayah Provinsi Aceh Line
275	Peta Garis Batas Administrasi Kabupaten Provinsi Aceh
276	Peta Garis Batas Administrasi Kecamatan Provinsi Aceh
277	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Barat
278	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Barat
279	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Besar
280	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya
281	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh
282	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil
283	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh
284	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh
285	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh

286	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Timur	
287	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Utara	
288	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Bener	
289	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Bireuen	
290	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Gayo Lues	
291	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Banda Aceh	
292	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Langsa	
293	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Lhokseumawe	
294	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Sabang	
295	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Subulussalam	
296	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Nagan Raya	
297	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Pidie	
298	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya	
299	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Simeulue	
300	Peta Batas Administrasi Kecamatan Provinsi Aceh	
301	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Barat	
302	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Barat	
303	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Besar	
304	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Jaya	
305	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh	
306	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil	
307	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh	
308	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh	
309	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh	
310	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Timur	
311	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Aceh Utara	
312	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Bener	
313	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Bireuen	
314	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Gayo Lues	
315	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Nagan Raya	
316	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Pidie	
317	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Pidie Jaya	
318	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kabupaten Simeulue	
319	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Banda Aceh	
320	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Langsa	
321	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Lhokseumawe	
322	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Sabang	
323	Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Subulussalam	
324	Peta Batas Administrasi Kabupaten Provinsi Aceh	
325	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Besar	
326	Peta Batas kabupaten Kota se Aceh	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh
327	Peta Sebaran Rumah Dhuafa Tahun 2022 (dari dana APBA total 8000 unit)	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Aceh